

---

# DINAMIKA PERDAGANGAN EMAS DAN BUDAK DI GORONTALO ABAD XVIII-XIX

## *THE DYNAMIC OF GOLD AND ENSLAVED PERSON TRADES IN THE 18TH-19TH CENTURIES GORONTALO*

**Retno Sekarningrum**

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII  
Bumi Beringin Link. V, Wenang, Manado, Indonesia  
retno.sekarningrum@kemdikbud.go.id

**Hasanuddin Anwar**

Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan-  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Jln. Condet Pejanten No. 4, Jakarta, Indonesia  
hasa010@brin.go.id

Diterima tanggal 6 November 2021

Disetujui tanggal 15 Mei 2023

### **ABSTRACT**

*As a hub between major ports such as Malacca, Singapore, Ternate, and Makassar, Gorontalo plays a crucial role in the shipping and trade networks of the northern region of Sulawesi. This condition was strengthened by the availability of numerous commodities, especially gold, and enslaved people. These two essential commodities had been exported, mainly by Bugis and Mandar traders, to the international market since the 16<sup>th</sup> century. Studies on the development of the Gorontalo port have received less attention from historians who only focused on the role of large ports. This paper focuses on the development of Gorontalo port in exporting gold and enslaved people in the 18<sup>th</sup> to 19<sup>th</sup> centuries. By implementing the historical method, which comprises heuristics, criticism, interpretation, and historiography, this paper points out that the development had its dynamics. Bugis and Mandar traders reflected this dynamic when they lost access to trade in gold and the enslaved people in Gorontalo since the VOC trade monopoly in the seventeenth century. The monopoly led to the vulnerability of shipping-trade activities around Gorontalo to rampant piracy by pirates and smuggling.*

**Keywords:** *trade, gold, enslaved people, piracy, smuggling, and Gorontalo.*

### **ABSTRAK**

Sebagai penghubung antara pelabuhan utama, seperti Malaka, Singapura, Ternate, dan Makassar, Gorontalo memainkan peran penting dalam jaringan pelayaran dan perdagangan di wilayah utara Sulawesi. Kondisi ini diperkuat oleh ketersediaan beragam komoditas, terutama emas dan budak. Dua komoditas penting ini telah diekspor, terutama oleh para pedagang Bugis dan Mandar, ke pasar internasional sejak abad XVI. Sayangnya, kajian mengenai perkembangan pelabuhan Gorontalo masih kurang mendapat perhatian dari para

sejarawan yang hanya berfokus pada peranan pelabuhan-pelabuhan besar. Tulisan ini melihat arah perkembangan pelabuhan Gorontalo dalam mengeksport emas dan budak pada abad XVIII hingga abad XIX. Dengan menerapkan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, tulisan ini memperlihatkan bahwa perkembangan pelabuhan Gorontalo dalam mengeksport emas dan budak mengalami dinamikanya sendiri. Dinamika itu tercermin dari hilangnya akses para pedagang Bugis dan Mandar terhadap perdagangan komoditas emas dan budak di Gorontalo sejak monopoli perdagangan VOC pada abad XVII. Monopoli perdagangan VOC atas komoditas tersebut berujung pada ketidakamanan aktivitas pelayaran-perdagangan di sekitar Gorontalo akibat maraknya perompakan oleh bajak laut dan penyelundupan.

**Kata kunci:** perdagangan, emas, budak, perompakan, penyelundupan, dan Gorontalo.

## A. PENDAHULUAN

Sejak abad XVI, Gorontalo telah ramai disinggahi oleh para pedagang lokal, seperti Bugis dan Mandar. Para pedagang lokal tersebut memperdagangkan beras dan kain untuk diperjualbelikan dengan komoditas-komoditas penting yang dihasilkan oleh Gorontalo, seperti emas dan budak yang dijadikan tenaga kerja (Paulus 1917). Gorontalo juga menghasilkan komoditas hutan, seperti damar dan rotan, serta komoditas laut, seperti tempurung penyu dan kulit kerang. Tak jarang, komoditas-komoditas tersebut juga dikirim hingga Singapura, Belanda, serta wilayah-wilayah lainnya di Eropa (Hoevel 1891). Adanya komoditas emas dan budak kemudian menjadikan Gorontalo sebagai pusat perdagangan penting dan menguntungkan bagi para pelaut-peniaga lokal, seperti Bugis dan Mandar, dalam melakukan aktivitas perniagaan di Teluk Tomini. Gobius, dalam catatan perjalanannya, bahkan menyebutkan bahwa Gorontalo dapat dibandingkan dengan Maluku sebagai wilayah penghasil komoditas perdagangan dunia, seperti pala dan cengkeh (Gobius 1915). Selain itu, adanya kontak niaga

antara Gorontalo dengan pelaut-pelaut Bugis dan Mandar mengakibatkan terbentuknya integrasi jaringan pelayaran dan perniagaan di kawasan laut Sulawesi bagian utara, baik pada masyarakat pendukungnya maupun relasi kuasa antarkerajaan.

Hubungan dinamis antara Gorontalo dengan para pedagang lokal tersebut kemudian memasuki babak baru ketika VOC berhasil mengambil alih dan memonopoli hampir semua jaringan pelayaran dan perniagaan di Sulawesi dan sekitarnya pada abad XVII. Para pelaut-peniaga lokal yang kehilangan jaringan dagang kemudian berusaha bertahan dari monopoli VOC, salah satunya dengan menjadi perompak atau bajak laut yang melakukan penyelundupan.

Anderson mengklasifikasi perompakan ke dalam tiga jenis, yaitu *parasitic*, *episodic*, dan *intrinsic*. Perompakan parasitik (*parasitic piracy*) merupakan perompakan yang diikuti dengan aktivitas perdagangan. Perompak episodik (*episodic piracy*) merupakan kegiatan sampingan dalam kegiatan utamanya sebagai pedagang. Perompakan dilakukan apabila kegiatan utamanya sebagai pedagang mengalami

kegagalan atau kerugian akibat monopoli perdagangan oleh kekuatan tertentu. Dalam konteks ini, timbulnya aktivitas perompakan merupakan akibat tidak adanya usaha untuk berdagang. Bugis dan Mandar adalah contoh perompak episodik. Hal ini yang kemudian mewarnai sejarah perniagaan di Gorontalo. Sementara itu, perompakan intrinsik (*intrinsic piracy*) merupakan suatu perompakan yang didalangi oleh kerajaan yang mengalami kekurangan sumber daya ekonomi sehingga terpaksa melakukan berbagai penarikan cukai dan pajak terhadap para pedagang yang melintasi perairan di sekitarnya atau bahkan melakukan perompakan (Sulistiyono 2012).

Tulisan ini ingin menjawab bagaimana dinamika perdagangan emas dan budak di Gorontalo pada abad XVIII hingga abad XIX. Gorontalo dipilih sebagai lokus karena peran strategisnya dalam dinamika jaringan pelayaran dan perdagangan di kawasan utara Sulawesi dan Teluk Tomini. Periode abad XVIII hingga abad XIX diambil sebagai batasan temporal untuk melihat bahwa dinamika perdagangan di Gorontalo terjadi lewat persaingan atau monopoli komoditas emas dan budak oleh VOC (selanjutnya pemerintah Hindia Belanda) yang kemudian berdampak kepada para pedagang lokal, seperti Bugis dan Mandar.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami bahwa dalam kurun waktu tersebut, dinamika perdagangan emas dan budak di Gorontalo terjadi melalui monopoli yang dijalankan oleh VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Monopoli tersebut kemudian

berdampak pada aktivitas para pedagang lokal seperti Bugis dan Mandar di kawasan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Interaksi antara para pedagang itulah yang kemudian membentuk jaringan pelayaran niaga sehingga Gorontalo menjadi salah satu unsur esensial yang mampu mengintegrasikan kawasan laut Sulawesi bagian utara, baik pada komunitasnya maupun hubungan antarkerajaan serta kekuasaannya. Tulisan ini penting karena selama ini sejarah perniagaan daerah periferi seperti Gorontalo masih sedikit menarik perhatian para peneliti dan sejarawan dibandingkan dengan pusat-pusat perdagangan lainnya pada masa lalu, seperti Makassar dan Ternate. Tulisan ini dapat menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki peranan penting dalam membentuk jaringan perdagangan khususnya di wilayah timur Indonesia pada abad XVIII hingga abad XIX melalui komoditas-komoditas andalan, seperti emas dan budak.

Ada beberapa kajian tentang kawasan laut Sulawesi bagian utara dan aktivitas perdagangannya pada masa lalu. Lopian telah mengawali studi kawasan Laut Sulawesi di dalam karyanya *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (2011). Lopian secara komprehensif mengulas tentang kondisi alam kawasan Laut Sulawesi. Pembahasan kemudian berlanjut tentang masyarakat pendukung wilayah tersebut yang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu orang laut, bajak laut, dan raja laut.

Selanjutnya, Warren melakukan kajian tentang kawasan Sulu dalam *The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics*

of *External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Marine State* (1981). Warren membahas mengenai aspek geografis, budaya, dan sejarah “zona perbatasan” Laut Sulu dan Sulawesi antara 1768 dan 1898. Ia juga mengulas interaksi yang kompleks antara kawasan Sulu dengan bangsa Cina dan Barat, termasuk dalam hal budak dan ekonomi secara umum.

Kemudian, di dalam *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan* (2016), Ulaen membahas mengenai Kepulauan Sangihe dan Talaud dari lintasan niaga menjadi daerah perbatasan di kawasan Sulawesi bagian utara. Proses pembagian wilayah mengakibatkan penduduk Kepulauan Sangihe dan Talaud terpisah dalam dua negara-bangsa yang berbeda (Indonesia-Filipina).

Sementara itu, kajian yang merujuk pada keberadaan kota pelabuhan di Nusantara juga telah mendapat perhatian para sejarawan. Di dalam bukunya berjudul *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera* (2007), pembahasan Asnan berfokus pada ruang darat dari sisi barat Sumatra dan orang-orang yang beraktivitas di sana, seperti masyarakat Minangkabau, Batak, Mentawai, dan Nias.

Sulistiyono dalam tesisnya, *Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 1859-1930* (1994), menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan ekonomi di Pelabuhan Cirebon telah mendorong perkembangan jalur transportasi antara pelabuhan dan daerah di pedalaman. Jaringan trans-

portasi tersebut kemudian membentuk pola permukiman penduduk yang semakin dekat ke pelabuhan dan memunculkan berbagai lembaga ekonomi multinasional. Selain itu, perkembangan Pelabuhan Cirebon didukung pula oleh komoditas-komoditas penting, seperti beras, gula, kayu, lada, dan sayuran.

Kajian kota pelabuhan di Sulawesi ditulis oleh Poelinggomang dalam buku *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (2002). Ia menjelaskan bahwa Makassar memiliki peran yang vital dalam perdagangan beragam komoditas yang dikirim ke daerah-daerah lainnya. Relasi antarwilayah ini selanjutnya membentuk kontak dan lalu lintas perdagangan penting di Makassar. Kebijakan perluasan hubungan perdagangan ini juga berhasil mencapai tujuan guna memosisikan Makassar sebagai sentral perdagangan, terutama di wilayah timur Nusantara.

Meskipun telah mengulas seputar aktivitas perdagangan di kawasan Sulawesi bagian utara dan sejarah kota-pelabuhan, namun tulisan-tulisan di atas tidak berfokus pada Gorontalo abad XVIII hingga abad XIX yang memiliki peran sebagai pelabuhan penghubung yang memasok komoditas penting, seperti emas dan budak. Tulisan ini dapat melengkapi narasi sejarah tentang kota pelabuhan, khususnya di kawasan Sulawesi bagian utara yang telah ada tersebut.

Sementara itu, dilihat dari kerangka konseptualnya, aktivitas perdagangan emas dan budak di Gorontalo dalam kurun abad XVIII hingga abad XIX lekat dengan konsep merkantilisme.

Konsep ini telah diterapkan oleh VOC dengan kepemilikan hak monopoli untuk mendirikan kegiatan ekonomi di Asia. Menurut Ravenhill (2008), dalam perdagangan rempah-rempah, reputasi VOC telah membantu perusahaan dagang itu membangun kekuatannya. Dengan kekuatan itu, VOC menciptakan dan mempertahankan hubungan pasar melalui kerangka politik. VOC menjadi perusahaan ekonomi paling efektif dan kompetitif dengan cara seperti itu. Melalui kontrak atau perjanjian dengan raja, VOC tidak hanya menerapkan kebijakan di kerajaan itu, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencegah persaingan, baik dengan para pedagang lokal maupun pedagang asing. Oleh karena itu, dalam sistem merkantilisme, VOC mengandalkan monopoli untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sistem monopoli ini jugalah yang diterapkan oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda dalam aktivitas perdagangan emas dan budak di Gorontalo dalam kurun abad XVIII hingga abad XIX.

## **B. METODE**

Tulisan ini menggunakan metode sejarah. Ada empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer, seperti arsip perjanjian atau kontrak di dalam kronik Gorontalo, bundel Gorontalo, bundel Ternate, Inventaris Arsip Gorontalo 1810-1865, dan *Corpus Diplomaticum* yang dihimpun dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara itu, sumber sekunder, seperti buku atau

artikel hasil penelitian terdahulu, diperoleh dari perpustakaan maupun dari sumber internet yang kredibel.

Tahap selanjutnya adalah melakukan kritik sumber untuk menguji informasi yang didapat itu otentik (kritik ekstern) dan kredibel (kritik intern) (Kuntowijoyo 1995). Kritik ekstern dilakukan dengan memeriksa keaslian data sejarah, seperti bahan penyusun dokumen atau kertas dokumen. Sementara itu, kritik intern dilakukan dengan mengecek isi dari bahan dan dokumen sejarah, misalnya dari bahasa, gaya penulisan, dan apa yang disampaikan dalam dokumen.

Setelah sumber diuji, kemudian sumber diinterpretasi. Interpretasi ini dilakukan sehingga data yang sudah diperoleh dapat dirangkai untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan. Tahapan terakhir adalah melakukan penulisan sejarah atau historiografi (Kartodirdjo 2014).

## **C. HASIL DAN BAHASAN**

### **1. Jejaring Gorontalo**

Letak Gorontalo dalam jalur pelayaran dan perniagaan cukup strategis karena berbatasan dengan Kalimantan di bagian barat, Kepulauan Maluku khususnya Ternate di bagian timur, Kepulauan Sulu (wilayah Filipina) di bagian utara, dan Makassar di bagian selatan. Gorontalo juga diapit oleh wilayah perairan yang strategis untuk aktivitas pelayaran, yakni Laut Sulawesi di utara, Teluk Tomini di selatan, dan Selat Makassar di barat. Tak heran jika pada masa lalu Gorontalo menjadi salah satu lokasi yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal dagang, baik pedagang lokal maupun pedagang asing lainnya.

Letak geografis Gorontalo dalam jalur pelayaran dan perdagangan berada di antara Malaka (Singapura), Ternate, dan Makassar sebagai pusat perdagangan. Jalur ini merupakan jalan strategis penting yang berkaitan dengan lalu lintas dan hubungan komunikasi antarpulau, serta jaringan perdagangan dalam dunia maritim yang terintegrasi secara ekonomi-politik (Henley 2005; Warren 1979). Tidak dapat dimungkiri bahwa faktor perdagangan maritim serta perebutan hegemoni antara Ternate-Makassar-VOC telah menentukan dinamika politik dan ekonomi di Gorontalo. Meskipun Gorontalo tampak terpinggirkan dalam dinamika sejarah nusantara, namun ia pernah berhasil menjalin suatu hubungan interaksi pelayaran antarpulau. Faktor inilah yang kemudian membuat Gorontalo mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan.



Gambar 1. Peta Teluk Tomini atau Gorontalo dan wilayah di sekitarnya, 1878 (*Kaart van de Golf van Tomini of Gorontalo en omliggende landen*). Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2012285>.

Pada abad XVI, jaringan pelayaran dagang di wilayah Gorontalo banyak digerakkan oleh orang-orang Bugis dan Mandar yang menggunakan perahu

tradisional. Mereka memiliki perahu-perahu dagang untuk mengangkut komoditas hasil bumi, seperti damar dan rotan, serta produk laut terutama kulit penyu dan kerang. Tak hanya beraktivitas di pesisir atau pelabuhan, perahu-perahu Bugis dan Mandar juga masuk ke wilayah pedalaman melalui jalur-jalur sungai (Vuuren 1917). Bahkan, beberapa pedagang Bugis dan Mandar yang memiliki kapal yang lebih besar juga membawa dan memasarkan langsung produk-produk dari Sulawesi bagian utara ke Cina. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Bugis dan Mandar menjadi roda penggerak penting bagi kehidupan perekonomian di wilayah utara Sulawesi.

Dalam hal politik, Gorontalo menjalin hubungan erat dengan Ternate, terutama pada masa pemerintahan Sultan Babullah Daud Syah (1570-1583). Pada masa itu, Sultan Babullah menempatkan sepuluh ribu pasukannya di Gorontalo dan Limboto (Kartodirdjo 1993). Adanya hubungan Gorontalo dengan Ternate dapat dilihat dari penggunaan nama jogugu, marsaoleh, kapitan laut, boki, dan kimalaha dalam jabatan birokrasi. Pada 1647, Gorontalo menjadi vasal dari Ternate dan harus mengirim upeti atau pemasukan pajak serta cukai ekspor-impor.

Selain Ternate, Gorontalo juga menjalin hubungan dinamis dengan Gowa. Di bawah kekuasaan I Manngarangi Daeng Manrabbia, Sultan Alauddin mengirim ekspedisinya ke Gorontalo pada 1627. Pada saat itu, Gowa membantu Gorontalo dalam perang melawan Limboto (Kartodirdjo 1993).

Titik balik hubungan politik antara Gorontalo dengan Ternate dan Gowa berubah ketika Perjanjian Bungaya ditandatangani pada 18 November 1667. Peristiwa tersebut menandai jatuhnya kekuasaan Ternate dan Gowa ke tangan VOC. Berdasarkan perjanjian tersebut pula, VOC berhak memperluas kepentingan politik dan ekonominya untuk menguasai negeri-negeri yang telah dikuasai kedua kerajaan tersebut. Gorontalo pun masuk dalam pengawasan VOC (Andaya 2015).

Selanjutnya, untuk menghadapi sentimen anti-VOC (*neerlandophobia*), pihak VOC giat mengunjungi negeri-negeri di bawah pengaruh Ternate dan Gowa, sekaligus untuk menanamkan kepentingan politiknya. Joan Maetsuyker (Gubernur Jenderal VOC di Batavia) mengutus Gubernur Maluku, Padtbrugge, mengunjungi Nusa Utara Sulawesi pada 1677.

Pada 16 Agustus 1677, Padtbrugge berangkat dari Ternate dengan kapal *De Vliegende Sween* dan Kamis, 2 September 1677, ia tiba di Manado (Leupe 1867). Kemudian, Padtbrugge melanjutkan perjalanannya dan sampai di Kwandang pada 25 September 1677. Di sana, Padtbrugge disambut oleh para pembesar Gorontalo dan Limboto, seperti para jogugu dan kapitan laut yang mewakili kedua kerajaan. Setelah pertemuan di Limboto pada 26 September 1677, Padtbrugge bersama Pachter Pieter Titesz, Jacob Idesz, dan Sekretaris Sultan Ternate mengunjungi Gorontalo. Keesokan harinya, pada 27 September 1677, diadakan pertemuan yang juga dihadiri para pembesar Gorontalo dan Limboto (Leupe 1867). Dalam pertemuan tersebut, disepakati

perjanjian yang isinya memuat delapan pasal. Secara garis besar, perjanjian tersebut menyatakan bahwa Sungai Gorontalo wajib dibuka untuk aktivitas pelayaran kapal-kapal VOC; penduduk Gorontalo dan Limboto harus menyerahkan damar, rotan, keranjang, dan bahan tali kepada VOC; Gorontalo dan Limboto tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain dan harus dengan sepengetahuan penguasa VOC di Ternate (Juwono dan Hutagalung 2005). Perjanjian itulah yang menjadi awal masuknya campur tangan VOC dalam mengatur politik dan ekonomi Gorontalo dan juga Limboto.

VOC melihat kekayaan alam Gorontalo yang begitu besar sehingga mereka berusaha menguasai daerah tersebut lebih kuat lagi. Usaha tersebut dilakukan dengan membarui perjanjian yang mulanya hanya delapan pasal menjadi dua puluh empat pasal pada 25 Maret 1678. Isi dari perjanjian baru tersebut di antaranya Raja Gorontalo dan Limboto harus tunduk dan setia kepada VOC (Pasal 1). Semua sahabat VOC akan menjadi sahabat Gorontalo dan Limboto serta wajib diperlakukan dengan baik seperti halnya kepada VOC. Sebaliknya, musuh VOC akan menjadi musuh Gorontalo dan Limboto yang harus diusir dan dilarang tinggal di wilayahnya. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi (Pasal 9). Gorontalo dan Limboto wajib menyetorkan sebagian panen padinya menurut kuota yang telah disepakati kepada VOC di Ternate dan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pejabat VOC di Manado. Pedagang VOC dan orang-orang *mardijker* (orang bebas yang bukan budak atau budak

yang telah dibebaskan karena membayar uang tebusan kepada VOC) boleh berdagang di Gorontalo dengan produk hasil bumi dan budak (Pasal 15). Gorontalo dan Limboto harus menyetorkan kulit kerang kepada VOC dengan harga 48 *stuiver* per pikul. Mereka tidak boleh menjualnya ke tempat lain, seperti ke Malaya (Pasal 16). Raja-raja Gorontalo dan Limboto tidak akan mengizinkan bangsa asing, baik Eropa maupun bumiputra (terutama musuh VOC di Gorontalo), untuk berdagang. Apabila terdapat kapal milik bangsa asing yang merapat di pantai Gorontalo maka raja harus segera mengusirnya dan secepat mungkin melaporkan kepada pejabat VOC terdekat (Pasal 17). Raja-raja Gorontalo dan Limboto harus membantu VOC mempertahankan harga rempah-rempah dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon rempah liar yang ditemukan dan ditanam tanpa seizin VOC (Pasal 21). Para pedagang VOC memperoleh kebebasan berdagang di daerah Gorontalo. Mereka dibebaskan dari cukai berlabuh dan memperoleh hak yang sama seperti penduduk Gorontalo, termasuk hak memperoleh perlindungan dari raja (Pasal 23) (*Corpus Diplomaticum* 1934). Pada 1679, VOC membarui lagi perjanjian terkait budak, yakni Raja Gorontalo diwajibkan menyerahkan budak sebanyak 150 kepala per tahun (Hasanuddin dan Amin 2012).

Kemudian, pada 1683, VOC kembali mendesak Raja Gorontalo lewat perjanjian tambahan yang isinya antara lain mengenai kewajiban menyetorkan emas dalam bentuk

batangan sebanyak dua kati setiap tahunnya yang harus diserahkan kepada pejabat VOC di Manado. Penyetoran emas ini pertama kali dilakukan melalui seorang utusan bernama Mayuda. Dari penyetoran pertama tersebut, pejabat VOC langsung menyadari bahwa produksi emas dari Gorontalo mempunyai kadar karat tinggi. Oleh karena itu, Mayuda kemudian diperintahkan untuk berangkat ke Ternate guna menghadap Gubernur Maluku, Jacobs Langs. Melihat kualitas emas Gorontalo, Mayuda kemudian diperintahkan oleh Langs untuk menghadap Joan Maaetsuyker, Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Dari sana pasal tambahan kembali disematkan dalam perjanjian yang mengatur penyerahan emas oleh Gorontalo setiap tahunnya kepada VOC (ANRI d t.t).

VOC terus membarui dan membuat perjanjian dengan raja-raja Gorontalo demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari komoditas yang ada di sana. VOC bahkan memperluas loji di Gorontalo dengan menempatkan seorang wakilnya, mendirikan kantor dagang (*factorij*), gudang penyimpanan barang (*packhuis*), dan membangun benteng-benteng di Gorontalo (Hasanuddin dan Amin 2012). Misalnya, Benteng Nassau didirikan pada 1746 di muara Sungai Gorontalo dan Benteng Leiden didirikan pada 1765 di Kwandang (Riedel 1870). Pendirian benteng di Gorontalo dilakukan sebagai upaya mengatasi maraknya penyelundupan barang serta aktivitas perompak Bugis dan Mandar di Kawasan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Kekuasaan VOC di

Gorontalo kemudian terus berlanjut bahkan saat serikat dagang tersebut bangkrut dan negara Hindia Belanda resmi berdiri. Gorontalo pun menjadi bagian dari negara kolonial yang kebijakan-kebijakan pemerintahnya masih memiliki tujuan yang sama, yakni mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan alam dan manusia yang ada di sana.



Gambar 2. Kapal-kapal di Pantai Gorontalo, 1880 (*Schepen in de baai van Gorontalo*).

Sumber: [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782746?solr\\_nav%5Bid%5D=9c500147eb87e1b3600a&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782746?solr_nav%5Bid%5D=9c500147eb87e1b3600a&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0).

## 2. Perdagangan Emas di Gorontalo

Emas merupakan salah satu logam mulia bernilai tinggi karena karakteristiknya yang langka, indah dan cenderung tahan terhadap korosi. Logam mulia ini menjadi salah satu komoditas ekspor penting di Gorontalo sejak abad XVII. Hal ini tak mengherankan karena kawasan Gorontalo mengandung sumber mineral emas yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Dataran di sebelah barat, misalnya, menghasilkan kandungan tembaga dan bismut. Sementara itu, beberapa tambang di sebelah timur laut Danau Limboto dan sebelah barat Gunung Kabila terdapat emas dalam

bentuk campuran kuarsa. Bahkan, di sepanjang Sungai Loneo ukurannya dapat sebesar telur burung merpati. Selain itu, di dataran Molombulahe dan Pahayato ditemukan serbuk emas dalam bentuk butiran di dasar sungai dan bercampur dengan pasir (Riedel 1870).

Secara umum, penambangan emas di daerah Gorontalo terdapat di daerah Balaya, Potanga, Batudulanga, Baginite, Nanasi, Lantia, Wongkaluhu, dan Lonouo. Di Limboto penambangan emas terdapat di Patente, Sumalata, dan Lakea. Untuk daerah Bone adalah di Utadu dan Tinongkihia. Di daerah Boalemo terdapat di Dulupi. Untuk daerah Katinggola penambangan dilakukan di Moawango, Binontu, Langki dan Langkian (Riedel 1870).

Pada Desember 1728, banyak orang Gorontalo pindah ke daerah perbatasan antara Gorontalo dan Kaidipang untuk melakukan penggalian emas di lereng pegunungan. Berita tentang penemuan emas di daerah tersebut diketahui dari pedagang Cina, Lin Tin Ko, yang kemudian menginformasikannya kepada Kapten Elias van Stade. Setelah ditemukan emas berkualitas tinggi, para penambang menjual emas-emas tersebut pada pedagang Cina seharga tiga belas ringgit untuk 2 keping real emas. Oleh para pedagang Cina, emas-emas tersebut kemudian dijual lagi di Manado dengan harga yang lebih mahal, yakni dua belas setengah ringgit untuk 1,5 keping real emas (1 real = f10). Melimpahnya sumber mineral emas kemudian menyebabkan banyak orang Gorontalo juga terlibat dalam pelayaran niaga sampai di Kepulauan Banggai (Coolhaas 1985).

Berita tentang penemuan sumber emas di Kaidipang itu ternyata tidak hanya menarik para pedagang Cina, namun juga para pedagang Mandar dan Weda (Halmahera). Banyak pedagang Mandar dan Weda yang datang ke Kaidipang untuk membeli lokasi penambangan di sana. Akan tetapi, hal tersebut ditolak oleh para penambang emas. Pedagang Mandar dan Weda kecewa dan menghadap Raja Kaidipang. Untuk menghindari konflik dengan Gorontalo, Raja Kaidipang melaporkan penemuan emas kepada Gubernur Maluku. Pada Desember 1728, Gubernur Maluku, Pielat, mengundang Raja Kaidipang ke Ternate untuk menyelesaikan konflik antara Kaidipang dengan Gorontalo tersebut. Setelah menerima laporan penemuan emas dan potensi tambang emas di Gorontalo, VOC tertarik untuk memonopolinya (Juwono dan Hutagalung 2005).

Pielat kemudian menghubungi Mattheus de Haan, Gubernur Jenderal VOC di Batavia, guna memberi tahu tentang penemuan emas tersebut. De Haan menyetujui usulan Pielat terkait penjaminan pasokan sumber mineral emas dari Gorontalo. Untuk melancarkan praktik monopoli emas tersebut, pada 31 Januari 1729, Pielat memberlakukan larangan berlayar ke Gorontalo, khususnya ke wilayah-wilayah penambangan emas, bagi semua pedagang Cina. Pihak VOC khawatir jika emas dari pedagang Cina dijual kepada penguasa Spanyol di Filipina. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Raja Atinggola dan Raja Bolango dengan mencegah penduduknya membuka permukiman di

dekat daerah tambang emas. VOC diperkirakan menerapkan monopoli emas sekitar 1.000 real emas setiap tahunnya dari setoran penduduk Gorontalo dan Limboto (Coolhaas 1985). Upaya monopoli tersebut didukung dengan pendirian pos-pos untuk mengawasi penyelundupan dan perniagaan emas di Gorontalo (Henley 2005).

Emas yang dipasok VOC sendiri mengalami pasang surut selama abad XVIII. Pada periode 1737-1749, pasokan emas sejumlah 47,9 kg dan mengalami peningkatan pada periode 1749-1755 sejumlah 61,2 kg. Penurunan pasokan emas terjadi pada periode 1758-1766 sejumlah 54,7 kg, dan rentang 1771-1778 sejumlah 42,4 kg. Kemudian, pada periode 1784-1789, VOC hanya mampu memasok emas sejumlah 12,7 kg, dan pada 1780 terjadi penurunan ekspor emas (Henley 2005). Pasang surut pasokan emas dari Gorontalo kepada VOC kemungkinan juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan gelap atau penyelundupan yang dilakukan oleh golongan bangsawan atau raja dengan bajak laut di wilayah tersebut. Para bangsawan atau raja Gorontalo bertransaksi dengan emas guna membayar barang dagangan yang dibeli dari para bajak laut sehingga pasokan emas kepada VOC semakin menipis (Juwono dan Hutagalung 2005). Di dalam faktur barang Residen Gorontalo pada 1800 tercatat aktivitas pemasukan emas dan perak yang diangkut ke Manado dengan kapal kora-kora (ANRI a.t.t).

Pada awal abad XIX, hubungan Gorontalo dengan pemerintah kolonial Belanda memasuki babak baru. Pihak

kolonial Belanda akhirnya mampu mengeksploitasi dan memonopoli tanpa mendapat rintangan yang berarti dari gerakan perlawanan daerah. Secara politik dan ekonomi, penguasa bumiputra mempunyai peran dan kedudukan yang penting dalam masyarakat. Pemerintah kolonial Belanda perlu membatasi kekuasaan para penguasa bumiputra. Melalui kontrak politik dan ekonomi yang sebagian besar dicapai dengan kekuasaan, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengambil alih peran penguasa pribumi dalam mengatur pemerintahan kerajaan. Selanjutnya, mereka menempatkan penguasa bumiputra dengan mengangkat *Gouvernement Radja* di bawah kekuasaannya dan diberi tugas sebagai pengawas dan perantara pemerintah kolonial Belanda dengan penduduk bumiputra (Kartodirdjo et al. 1973).

Pemerintah kolonial Belanda meningkatkan perhatiannya pada komoditas emas dan komoditas lain, seperti kopi, rotan, dan damar. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda kembali menekan raja-raja Gorontalo untuk menyetujui perjanjian-perjanjian baru. Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut umumnya masih membahas seputar kepentingan politik dan ekonomi Hindia Belanda di Gorontalo. Pada 31 Desember 1819, pemerintah kolonial Hindia Belanda menekan Raja Gorontalo, Muhijuddin Muhammad Jair Iskandar Monoarfa, dalam perjanjian yang intinya mewajibkan Gorontalo untuk menyerahkan komoditas emas dan kopi (ANRI b.t.t).

Tak berhenti sampai di situ, perjanjian baru dengan Raja Mohammad Iskandar Pui Monoarfa kembali diajukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 9 Januari 1828. Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausul-klausul yang isinya mengatur bahwa: (a) raja dan para bangsawan Gorontalo tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dagang dengan pedagang-pedagang Eropa, kecuali dengan pengetahuan dan izin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda (Pasal 2); (b) pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan penyerahan wajib 700 real emas kepada raja dan penduduk Gorontalo, sementara itu penghasilan dalam bentuk lainnya dapat diperdagangkan secara bebas (Pasal 10). Keuntungan yang didapat dari perdagangan komoditas kopi wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian. Harga kopi setiap tahunnya juga ditentukan oleh pemerintah kolonial. Sebagai contoh, pada 1828 harga kopi dipatok sebesar f16 per pikul atau 125 liter. Demikian pula raja dan bangsawan Gorontalo sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam menentukan pajak daerah yang berproduksi (Pasal 11). Penduduk Gorontalo dilarang meninggalkan Gorontalo untuk berdagang, apabila belum memiliki izin dari raja yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari residen (Pasal 12). Raja dan bangsawan Gorontalo memberikan izin kepada rakyat Bintauna, Boalemo, Bone, dan Suwawa untuk menambang emas di Molosifat. Aktivitas penambangan

emas itu diawasi oleh Gorontalo dengan perhitungan hasil emas untuk keperluan izin menambang (Pasal 15) (Kartodirdjo et al. 1973).

Pada tahun 1834, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran daerah penghasil emas di Atinggola, Boalemo, Bone, Bolango, Limboto, dan Sumalata yang mulai melakukan aktivitas penambangan emas pada 1831. Perniagaan emas di daerah-daerah tersebut dilakukan pada periode 1831-1833 dan 1845. Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda kembali mengeluarkan peraturan tentang monopoli emas yang meregulasi harga emas serta pajak penghasilan atas emas dan perak pada 1833 (ANRI c t.t). Oleh karena banyaknya aturan tentang perdagangan emas, penyelundupan komoditas ini ke Singapura terjadi pada 1846. Jumlah emas yang diselundupkan tersebut ditaksir sebanyak empat kali lipat lebih besar dari emas yang dikirim ke Belanda (Henley 2005).

Orang-orang Bugis dari Bone juga banyak membuka tambang emas di Gorontalo secara berkelompok. Mereka harus mendapat izin penambangan terlebih dahulu dari Raja Gorontalo dan kemudian diwajibkan membayar biaya izin sebesar f30-35 setiap kali melakukan penambangan. Hasil pajak tambang sebesar f16 juga harus disetor kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setidaknya, selama periode 1842-1844 pemerintah kolonial berhasil mengumpulkan pajak tambang secara berturut-turut sebesar 799 real, 662 real, dan 750 real (Hoevell 1850).



Gambar 3. Orang-orang Bone di dekat perkampungan Bugis di Gorontalo, 1900 (*De Bone bij de wijk Boegis te Gorontalo*).

Sumber: [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/820460?solr\\_nav%5Bid%5D=e4a4acc8a5cb016e47e7&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/820460?solr_nav%5Bid%5D=e4a4acc8a5cb016e47e7&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0).

Aktivitas penambangan emas oleh orang-orang Bugis biasanya juga dilakukan dengan menukarkan candu. Selain itu, mereka juga memasarkan kain dengan harga mahal di pertambangan yang dikelola oleh para bangsawan dan kepala adat (Riedel 1870).

Ditemukannya daerah-daerah pertambangan baru juga menyebabkan meningkatnya jumlah perusahaan tambang yang ingin menanamkan investasinya di Gorontalo. Selama April hingga September 1897 tercatat ada 39 perusahaan yang tersebar di Kota Gorontalo, Batudaa, Kabila, Bone, Boalemo, Paguat, Tibawa, Paguyaman, dan Kwandang. Sebagai gambaran, produksi emas di Sumalata pada 1907, sebelum dibuka izin penambangannya, sudah mencapai hampir 3 ton perak dan 0,5 ton emas (Cabaton 2015).

**3. Perdagangan Budak di Gorontalo**  
 Selain emas, Gorontalo juga mengeksport komoditas lain yang tak

kalah menggiurkan, yakni budak sebagai sumber tenaga kerja. Budak di Gorontalo biasanya diperoleh dari hasil peperangan antarkelompok, sanksi bagi mereka yang tidak mampu membayar utang, atau hukuman karena tidak memenuhi kebijakan penguasa. Setidaknya ada tiga jenis budak di Gorontalo, yaitu *ilapita*, *mongoohule*, dan *wato to talu*. *Ilapita* adalah budak raja yang berkuasa. Mereka harus menggarap sawah dan kebun tanpa diupah dan berulang kali dikirim ke tambang untuk mengumpulkan emas. *Mongoohule* adalah keturunan budak yang tidak tinggal bersama tuannya, tetapi diwajibkan membantu dalam setiap upacara. *Wato to talu*, yang sering disebut budak pusaka, budak rumah, atau budak “*babalian*”, merupakan budak yang diperoleh dari pewarisan, pertukaran, hibah, atau pembelian.

Perdagangan budak di Nusantara meningkat pada abad XVII ketika Belanda dan Spanyol membutuhkan tenaga untuk membangun kota-kota kekuasaan mereka. Dalam kasus Belanda, mereka juga membutuhkan tenaga untuk perkebunan-perkebunan yang dibuka di Banda, Ambon, Jawa Barat, Sri Lanka, dan Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Kebutuhan budak dari daerah Timur semakin meningkat ketika pada 1689 VOC melarang penggunaan budak dari daerah Butung, Malay, Makassar, Bali, dan Jawa karena mereka terkenal mulai suka melawan dan melakukan kekerasan pada tuannya (Andaya 1991).

Di daerah Timur sendiri, pasar budak yang paling utama terletak di Kepulauan Laut Seram. Sementara itu, budak-budak dari Gorontalo dan

Limboto biasanya akan dibawa ke Banggai dan Tobunku. Dari sana, biasanya budak akan dibeli oleh para pedagang Bugis (Andaya 1991).

Monopoli perdagangan budak di Gorontalo oleh VOC terjadi kala Gubernur VOC di Maluku, Robertus Padtbrugge, mulai mengaturnya melalui perjanjian dengan Raja Gorontalo pada 25 Maret 1678. Perjanjian tersebut memuat dua puluh empat pasal. Salah satu di antaranya mengatur bahwa pedagang VOC diperbolehkan dan dibebaskan melakukan perniagaan budak (Pasal 15). Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang-orang yang bukan penduduk Gorontalo di pantai Teluk Tomini dan perairan Gorontalo tidak boleh ditangkap, kecuali jika mereka merupakan budak yang melarikan diri. Jika hal itu terjadi maka mereka wajib ditangkap dan diserahkan kepada VOC serta harus membayar ganti rugi sesuai dengan harga budak yang ditetapkan (Pasal 20) (*Corpus Diplomaticum* 1934). Pada tahun 1679, VOC kembali memperbarui perjanjian yang isinya mewajibkan Raja Gorontalo menyerahkan budak sebanyak 150 orang per tahunnya (Hasanuddin dan Amin 2012).

Ikhwal perdagangan budak di Gorontalo dipengaruhi juga oleh perjanjian tambahan yang dibuat oleh VOC pada 1683. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Kerajaan Gorontalo wajib menyetor emas dalam bentuk batangan sebanyak 2 kati per tahunnya (Juwono dan Hutagalung 2005). Tak hanya Kerajaan Gorontalo, penduduk juga diharuskan menyerahkan emas setiap tahunnya. Hukuman bagi penduduk yang tidak mampu

memenuhi kewajiban tersebut adalah mereka akan dimasukkan ke pasar budak oleh pemimpinnya untuk dijual dengan harga tinggi dengan tujuan menebus kewajiban setoran emasnya kepada VOC. Banyak dari penduduk Gorontalo yang kemudian memilih melarikan diri ke hutan karena takut dijual sebagai budak jika tidak memenuhi setoran emas (Riedel 1870).

Pada abad XVIII, budak di Gorontalo tidak hanya dipasok dari dalam wilayahnya sendiri. Sebagian besar budak di Gorontalo juga berasal dari daerah Toli-Toli (Andaya 1991) dan kawasan Teluk Tomini. Dari kedua wilayah tersebut, budak diekspor ke Gorontalo untuk diperdagangkan. Banyaknya jumlah budak di Gorontalo kemudian menarik perhatian para perompak Bugis, Mandar, Mangindano, dan Tobelo. Mereka sering kali merampok dan menculik masyarakat di sekitar Gorontalo dan Teluk Tomini untuk dijadikan budak. Untuk mengatasi hal ini, pada 1729, VOC meningkatkan patroli keamanannya dengan menambah pasukan garnisun di Gorontalo (Henley 2005).

Pada 1818, pemerintah kolonial Belanda mulai mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran dan pendataan budak (Pelras 2006). Pendaftaran budak dilakukan dengan mencatat identitas mereka, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nama pemilik dan perubahan kepemilikan, kematian, riwayat perjalanan dari dan ke tempat lain, hingga data tentang pelarian dan pengembalian (ANRI c.t.t). Selanjutnya, dikeluarkan pula kebijakan yang mengatur tentang pajak budak

pada 1828, 1829, 1832, 1833, dan 1834. Kebijakan penerapan pajak tersebut karena budak merupakan komoditas penting yang mampu mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintah.

Hingga 1850, perbudakan merupakan hal yang masih umum ditemui di daerah Gorontalo. Aktivitas perniagaan budak saat itu bahkan masih dilakukan dalam jumlah besar (Riedel 1870). Hal ini terlihat dari pernyataan Assisten Residen van Baak pada 1856 yang mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari 40.000 penduduk Gorontalo berada dalam perbudakan (Haga 1931). Sistem perbudakan di Gorontalo baru dihapus oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1859 (Henley 2005). Setelah itu, banyak budak melakukan emigrasi ke daerah-daerah lain.



Gambar 4. Penduduk Gorontalo, 1870 (*Inwoners van Gorontalo*). Sumber: [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/801965?solr\\_nav%5Bid%5D=c14fd9582a47af04a817&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/801965?solr_nav%5Bid%5D=c14fd9582a47af04a817&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0).

#### **4. Perompakan dan Penyelundupan**

Berbicara tentang aktivitas perdagangan emas dan budak di Gorontalo pada abad XVIII hingga abad XIX tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang perompakan dan penyelundupan. Hart (1853) dalam laporannya bahkan menyatakan bahwa Gorontalo merupakan sarang bajak laut. Meski demikian, dari sudut pandang lokal, aktivitas perompakan dan penyelundupan tersebut merupakan salah satu upaya para pelaut-peniaga lokal untuk bertahan dari sistem monopoli VOC yang memberangus jaringan perdagangan mereka.

Meningkatnya aktivitas perompakan oleh bajak laut di Laut Sulawesi dan Teluk Tomini (termasuk Gorontalo) terutama terjadi setelah disepakatinya Perjanjian Bungaya pada 1667 antara VOC dengan Gowa. Hal ini membuat VOC menguasai jalur-jalur perdagangan penting dan melakukan monopoli. Akibatnya, banyak pedagang lokal, seperti Bugis dan Mandar, yang kehilangan jaringan niaga. Mereka pun mencoba bertahan dari sistem monopoli VOC. Salah satu caranya adalah dengan beralih menjadi perompak. Selain Perjanjian Bungaya, penutupan perairan Filipina yang dilakukan oleh penguasa Spanyol akibat perjanjian perbatasan antara penguasa Spanyol di Filipina dan Belanda di Ternate juga turut memicu munculnya para perompak di Laut Sulawesi.

Perompak di kawasan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini utamanya adalah bajak laut Mangindano dan Tobelo (Halmahera Utara). Wilayah jelajah para perompak tersebut hingga mencapai Laut Banda, Laut Flores, Laut

Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Kepulauan Banggai, Tobungku, dan Kepulauan Buton.

Bajak laut Tobelo biasanya berkekuatan sekitar 400 orang yang semuanya berasal dari Tobelo, Galela, Loloda, dan sekitar Halmahera (Lapian 2008). Mereka memperkuat aktivitasnya dengan bersumpah di hadapan Al-Qur'an (Lapian 2008) serta membangun tempat persembunyian dan perbekalan (Velthoen 2010).

Dalam sekali pelayaran, bajak laut Tobelo membawa setidaknya empat atau lima armada perahu. Masing-masing perahu dapat mengangkut hingga sepuluh orang di dalamnya. Untuk penjelajahan yang besar, bajak laut Tobelo juga melengkapi armadanya dengan perahu-perahu kecil guna membentuk pasukan yang lebih besar. Pada 1870, dikabarkan ada 48 perahu bajak laut Tobelo yang lalu-lalang di kawasan Teluk Tomini. Karena luasnya wilayah ekspedisi, para perompak Tobelo terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke perairan timur Sulawesi (Velthoen 2010).

Selain bajak laut Tobelo, perompakan juga sering dilakukan oleh bajak laut Mangindano, Bugis, dan Mandar. Eksistensi pelaut dari Mandar sebagai perompak di perairan Gorontalo telah menyebabkan meningkatnya aktivitas bajak laut di kawasan itu. Dalam rangka melancarkan pengawasannya di kawasan Teluk Tomini, bajak laut Mandar bahkan membangun pangkalan atau markasnya di Gorontalo. Laporan tentang makin masifnya kegiatan perompakan di Gorontalo membuat Gubernur Maluku

di Ternate mengecam kegiatan tersebut dan kemudian mengambil tindakan tegas untuk memberantasnya. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan VOC adalah mendirikan benteng-benteng di Gorontalo.

Perompak umumnya hanya menyasar kapal-kapal dagang VOC yang diketahui banyak mengangkut barang-barang dagangan yang laku di pasar, seperti emas, hasil bumi, dan hasil hutan (Mallari 1989). Akan tetapi, pada perkembangannya mereka juga merompak kapal-kapal dagang lainnya, bahkan sering kali menyerang penduduk di kawasan Teluk Tomini untuk dijadikan sebagai budak (Hasanuddin 2016).



Gambar 5. Hasil hutan berupa rotan yang dikirim ke kapal di Gorontalo, 1925 (*Verscheperen van rotan naar een schip van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij op de rede van Gorontalo*). Sumber: [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782347?solr\\_nav%5Bid%5D=f2154abb17017c500a15&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=1](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782347?solr_nav%5Bid%5D=f2154abb17017c500a15&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=1).

Selain menjadi perompak, bajak laut Bugis juga aktif dalam perniagaan gelap atau penyelundupan barang. Untuk mempermudah penyelundupan, mereka biasanya mengadakan hubungan dagang dan kerja sama dengan raja-raja lokal, seperti Buol, Gorontalo, dan Limboto. Orang-orang

Bugis umumnya menjual barang dagangan yang telah dimonopoli penjualannya oleh VOC, seperti kain, beras, dan garam, dengan harga yang lebih murah. Hal ini dilihat oleh raja dan bangsawan lokal sebagai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan karena para bajak laut Bugis bersedia membeli barang dagangan mereka dengan harga lebih tinggi dari harga beli VOC.

Akibat perdagangan gelap atau penyelundupan tersebut, penyerahan setoran emas dari Gorontalo kepada VOC semakin sedikit setiap tahunnya. Hal ini karena Gorontalo membayar barang dagangan yang dibeli dari para bajak laut dengan emas sehingga persediaan emas semakin menipis (Juwono dan Hutagalung 2005).

Hingga abad XIX, aktivitas bajak laut di kawasan Teluk Tomini masih tergolong tinggi. Asisten Residen Gorontalo melaporkan bahwa pada 1824, 1832, 1833, dan 1834, aktivitas perompakan marak terjadi di Gorontalo. Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan pengoperasian sebuah kapal uap perang untuk mengawasi perairan Gorontalo dari aktivitas bajak laut (Hasanuddin 2016). Perang pemerintah kolonial terhadap aktivitas perompakan dapat dikatakan benar-benar berakhir setelah memasuki dekade awal abad XX (Hasanuddin 2016). Selain karena meningkatnya aktivitas pengawasan di sekitar Teluk Tomini oleh pemerintah Hindia Belanda (Velthoen 2010), berakhirnya aksi perompakan di kawasan tersebut juga disebabkan oleh penangkapan Tombolotutu, seorang pimpinan bajak laut yang terkenal di

perairan Teluk Tomini selama abad XIX (Veth 1870). Pemerintah Hindia Belanda kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Tombolotutu (Anonim 1902).



Gambar 6. Kapal uap di Gorontalo, 1910 (*Het stoomschip Van Heemskerk van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor de rede van Gorontalo*). Sumber: [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/912455?solr\\_nav%5Bid%5D=0348dal18a456bfc5404&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/912455?solr_nav%5Bid%5D=0348dal18a456bfc5404&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0).

#### D. SIMPULAN

Gorontalo memiliki posisi penting sebagai penghubung dalam jalur pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Malaka (Singapura), Ternate, dan Makassar. Jalur ini merupakan jalan strategis yang penting untuk transportasi dan komunikasi antarpulau, serta jaringan perdagangan dalam dunia maritim yang terintegrasi secara ekonomi-politik. Dari aspek komoditas, Gorontalo merupakan penghasil emas dan budak yang telah ramai diperdagangkan oleh para pedagang lokal, seperti Bugis dan Mandar, sejak abad XVI. Sementara itu, dalam hal politik, Gorontalo menjalin hubungan erat dengan Ternate, terutama pada masa kekuasaan Sultan Babullah Daud

Syah (1570-1583). Gorontalo juga menjalin hubungan dinamis dengan Gowa saat kerajaan tersebut di bawah kekuasaan I Manngarangi Daeng Manrabbia, Sultan Alauddin.

Titik balik kekuasaan dan hubungan politik antara Gorontalo dengan Ternate dan Gowa berubah ketika Perjanjian Bungaya ditandatangani pada 18 November 1667. Peristiwa tersebut menandai jatuhnya kekuasaan Ternate dan Gowa ke tangan VOC. Berdasarkan perjanjian tersebut pula, VOC berhak memperluas kepentingan politik dan ekonominya untuk menguasai negeri-negeri yang telah dikuasai kedua kerajaan tersebut, termasuk Gorontalo. Dengan demikian, dimulailah kebijakan monopoli VOC atas komoditas perdagangan penting yang ada di Gorontalo, seperti emas dan budak.

Emas tersebar hampir di seluruh wilayah Gorontalo. Adanya informasi tentang sumber emas yang melimpah di Gorontalo tersebut membuat Pielat, Gubernur VOC di Maluku, meluncurkan praktik monopoli emas pada 31 Januari 1729. Pielat membuat kebijakan tentang pelarangan pedagang-pedagang Cina yang hendak berlayar ke Gorontalo, khususnya di wilayah-wilayah penambangan emas. VOC juga menerapkan monopoli emas sekitar 1.000 real emas setiap tahunnya dari setoran penduduk Gorontalo dan Limboto. Upaya monopoli tersebut didukung dengan pendirian pos-pos untuk mengawasi penyelundupan dan perniagaan emas di Gorontalo.

Sementara itu, budak di Gorontalo biasanya diperoleh dari hasil peperangan antarkelompok, sanksi bagi

mereka yang tidak mampu membayar hutang, atau hukuman karena tidak memenuhi kebijakan penguasa. Budak di Gorontalo tidak hanya didapat dari dalam wilayah saja, namun juga dari Kepulauan Togean dan Toli-Toli. Budak-budak dari Gorontalo dan Limboto biasanya akan dibawa ke Banggai dan Tobunku. Dari sana, budak akan dibeli oleh para pedagang Bugis. Monopoli perdagangan budak di Gorontalo oleh VOC mulai diberlakukan setelah perjanjian dengan Raja Gorontalo ditandatangani pada 25 Maret 1678.

Monopoli komoditas perdagangan emas dan budak oleh VOC menyebabkan para pedagang lokal, seperti Bugis dan Mandar, mulai kesulitan mengakses jaringan pelayaran dan perdagangan di Gorontalo. Akibatnya, beberapa dari pedagang lokal, seperti Bugis dan Mandar, menjadi perompak atau bajak laut. Perompak umumnya hanya menyerang kapal-kapal dagang VOC. Akan tetapi, pada perkembangannya mereka juga merompak kapal-kapal dagang lainnya, bahkan sering kali menyerang penduduk di kawasan Teluk Tomini untuk dijadikan budak. Selain merompak, para bajak laut juga menjalin hubungan kerja sama dengan raja dan bangsawan lokal untuk melakukan penyelundupan. Untuk mengatasi perompak dan penyelundupan, salah satu upaya yang diambil oleh VOC adalah dengan membangun benteng-benteng di Gorontalo dan memperkuat pengawasan.

Hingga abad XIX, emas masih menjadi komoditas penting Gorontalo. Ditemukannya daerah-daerah per-

tambangan baru justru menyebabkan meningkatnya jumlah perusahaan tambang yang ingin menanamkan investasinya di Gorontalo. Di saat bersamaan, pemerintah kolonial juga mulai mengeluarkan peraturan pendaftaran dan pemberlakuan pajak budak. Sampai 1850, perdagangan budak merupakan kegiatan yang masih umum terjadi di daerah Gorontalo, bahkan dilakukan secara masif. Sistem perbudakan di Gorontalo baru dihapus oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1859.

Aktivitas perompakan di Gorontalo juga mulai berkurang pada pertengahan abad XIX. Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda terus meningkatkan patroli dan operasi kapal perangnya di kawasan Teluk Tomini untuk menghalau aktivitas bajak laut. Aktivitas perompakan di wilayah ini baru berakhir setelah memasuki dekade awal abad XX.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan sumber untuk penelitian artikel ini. Terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara atas dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR SUMBER

- Andaya, Leonard Y. 1991. "Local Trade Networks in Maluku in the 16th, 17th, 18th Centuries." *Cakalele* 2(2):71-96.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Dunia Maluku: Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal*. Yogyakarta: Ombak.
- Anonim. 1900. "De Bone bij de wijk Boegis te Gorontalo." Diunduh 12 November, 2021 ([https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/820460?solr\\_nav%5Bid%5D=e4a4acc8a5cb016e47e7&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/820460?solr_nav%5Bid%5D=e4a4acc8a5cb016e47e7&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0)).
- Anonim. 1902. "Gorontalo." *Soerabajasch Handelsblad*, Oktober, 29.
- Anonim. 1910. "Het stoomschip Van Heemskerk van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij voor de rede van Gorontalo." Diunduh 12 November, 2021 ([https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/912455?solr\\_nav%5Bid%5D=0348da118a456bfc5404&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/912455?solr_nav%5Bid%5D=0348da118a456bfc5404&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0)).
- Anonim. 1925. "Verschepen van rotan naar een schip van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij op de rede van Gorontalo." Diunduh 12 November, 2021 ([https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782347?solr\\_nav%5Bid%5D=f2154abb17017c500a15&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=1](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782347?solr_nav%5Bid%5D=f2154abb17017c500a15&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=1)).
- ANRI a. t.t. "Bundel Gorontalo Nomor 14."
- ANRI b. t.t. "Bundel Ternate Nomor 131."
- ANRI c. t.t. "Inventaris Arsip Gorontalo 1810-1865."
- ANRI d. t.t. "Kroniek Gorontalo over Het Jaar 1681."
- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Cabaton, Antoine. 2015. *Jawa, Sumatra & Kepulauan Lain di Hindia Belanda*. Yogyakarta: Ombak.
- Coolhaas, W. P. H. 1985. *Generale Missiven van Gouverneur General En Raden Aan Heren XVII Der Verenigde Oost Indische Compagnie, Deel VIII: 1725-1729*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Corpus Diplomaticum. 1934. *Corpus Diplomaticum Nederlando-Indicum III (1676-1691)*. Uitgegeven door J.E. Heeres. 's-Gravenhage: Nijhoff.
- Frederick, William H. 1984. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Gobius, G. 1915. *Herinneringen Uit Mijne Loopbaan Bij de Marine 1874-1908*. 's-Gravenhage: W.P. Van Stockum & Zoon.
- Haga, B. J. 1931. *De Lima-Pahalaä (Gorontalo): Volksordening Adatrecht En Bestuurspolitiek, LXXI*. Bandung: A.C Nix.

- Hart, J. C. van der. 1853. *Reize Rondon Het Eiland Celebes En Naar Eenige Der Moluksche Eilanden*. Gravenhage: K. Fuhri.
- Hasanuddin. 2016. *Pelayaran dan Perdagangan Orang Bugis Mandar di Teluk Tomini*. Yogyakarta: Amara Books.
- Hasanuddin dan Basri Amin. 2012. *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Henley, David. 2005. *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. Leiden: KITLV.
- Hoevel, G. W. W. C. Baron van. 1891. *De Assistant-Residentie Gorontalo*. Leiden: E.J. Brill.
- Hoevell, W. R. van. 1850. "Lets Over de Goudgraverijen in de Residentie Menado." *Tijdschrijt Voor Nederlandsch-Indie* 12.
- Juwono, Harto dan Yosephine Hutagalung. 2005. *Limo Lo Pohalaa*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirdjo, Sartono et al. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: ANRI.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.
- Lapian, Adrian. B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Leupe, P. A. 1867. "Het Journaal Van Padtbrugge's Reis Naar Nord-Celebes En De Noordereilanden, 16 Aug.-23 Dec. 1677." *Bidragen tot de Taal-, Land- en Volkekunde van Nederlandsch-Indie* 14 (1):105-268
- Mallari, S. J., Fransisco. 1989. "The Spanish Navy in the Philipines, 1589-1727." *Philipines Studies* 37:412-39.
- Musschenbroek, S.C.J.W. van. 1878. "Kaart van de Golf van Tomini of Gorontalo en omliggende landen." Diunduh 12 November, 2021 (<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2012285>).
- Paulus, J. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, Eerste Deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris École française d'Extrême-Orient.

- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ravenhill, John. 2008. "The Study of Global Political Economy." Hlm. 3-25 dalam *Global Political Economy*. disunting oleh John Ravenhill. Oxford: Oxford University Press.
- Riedel, J. G. F. 1870. "Het Landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo En Katinggola of Andagile: Geographische, Statistische, Historische En Ethnographische Aanteekeningen." *Tijdschrijt voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde* 19:46-153.
- Sulistiyono, Singgih Tri. 1994. "Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 1859-1930." Tesis, Fakultas Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. "Dinamika Kemaritiman dan Integrasi Negara Kolonial." Hlm. 86-125 dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah: Kolonisasi dan Perlawanan*, disunting oleh Djoko Surjo dan Nina Herlina Lubis. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ulaen, Alex John. 2016. *Nusa Utara: dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Yogyakarta: Ombak.
- Velthoen, Esther. 2010. "Pirates in the Periphery: Eastern Sulawesi 1820-1905." Hlm. 200-21 dalam *Pirates, Ports, and Coats in Asia: Historical and Contemporary Perspectives*, disunting oleh John Kleinen dan Manon Osseweijer. Singapore: IIAS/ISEAS.
- Veth, P.J. 1870. "De Zeeroverij in den Indischen archipel, Als Een Bijzondere Vorm van de heilige Oorlog Tegen Ongeloovigen Berschouwd." *Tijdschrijt voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* I: 175-76.
- Vuuren, L. van. 1917. "De Prauwvaart van Celebes." *Koloniale Studien* 1:107-16.
- Warren, James Francis. 1979. "The Sulu Zone; Commerce and the Evolution of a Multi-Ethnic Polity 1768-1898". *Archipel* 18: 223-29.
- \_\_\_\_\_. 1981. *The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State*. Singapura: Singapore University Press.
- Woodbury & Page (Java). 1870. "Inwoners van Gorontalo." Diunduh 12 November, 2021 ([https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/801965?solr\\_nav%5Bid%5D=c14fd9582a47af04a817&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=0](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/801965?solr_nav%5Bid%5D=c14fd9582a47af04a817&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0)).
- \_\_\_\_\_. 1880. "Schepen in de baai van Gorontalo." Diunduh 12 November, 2021 (<https://>

digitalcollections.universiteitleiden.nl/  
view/item/782746?solr\_  
nav%5Bid%5D=9c500147  
eb87e1b3600a&solr\_nav%5Bpage%  
5D=0&solr\_nav%5Boffset%5D=0).